

Joint Statement

Sebuah Peringatan untuk Merilis Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration/AHRD)

Kami, berbagai organisasi masyarakat sipil dan jaringan dari Asia Tenggara yang bertanda tangan dibawah ini, mengekspresikan perhatian dan kekecewaan terdalam kami terhadap proses perancangan Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration/AHRD) yang dirahasiakan.

Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Pemerintah ASEAN (The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR) sesuai Kerangka Acuannya dipasal 4.2. dimandatkan untuk mengembangkan sebuah Deklarasi HAM ASEAN dengan tujuan untuk membangun sebuah kerangka untuk kerja sama dalam bidang HAM melalui berbagai konvensi ASEAN dan instrumen-instrumen lainnya yang mengatur isu HAM. Pada pertemuan ke 6 AICHR di Vientiane pada tanggal 28 Juni 2011 – 2 Juli 2011, sebuah kelompok penyusun (Drafting Group) telah secara resmi dibentuk oleh *AICHR* untuk mempersiapkan draf Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Pada bulan Januari 2012, kelompok penyusun memberikan sebuah draft AHRD kepada AICHR untuk dibahas dan didiskusikan.

Hingga hari ini, draf AHRD masih bersifat rahasia (confidential) dimana masyarakat telah dieksklusikan (tidak diikutsertakan) dari pembahasan yang partisipatif dalam proses penyusunan. Belum ada konsultasi regional yang berbasis luas dan substansial dengan masyarakat ASEAN atas draf AHRD.

Walaupun kami menghargai perwakilan AICHR dari Thailand, Indonesia, Malaysia dan Filipina yang telah mengadakan konsultasi dengan masyarakat sipil di tingkat nasional, kami masih merasa terganggu dengan tidak adanya inisiatif yang terlaksana di negara-negara ASEAN lainnya.

Apabila tujuan ASEAN untuk menjadi “*People-Oriented*” (berorientasikan ke masyarakat) ingin tercapai, maka AICHR yang bertugas untuk membela kebebasan fundamental masyarakat dikawasan Asia Tenggara harus memberikan sebuah contoh baik dalam menjamin konsultasi yang berarti dan substansial serta menjamin partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AHRD yang akan bersejarah ini.

Maka dari itu, kami dengan sangat mendesak kepada AICHR, meminta untuk mengindahkan rekomendasi dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, yang menjelaskan bahwa “*tidak ada diskusi hak Asasi manusia yang dapat menjadi sempurna atau kredibel tanpa masukan yang signifikan dari masyarakat sipil dan institusi hak Asasi manusia di tingkat nasional*” dan segera memulai dialog dan konsultasi dengan masyarakat sipil mengenai AHRD.

Kami juga mengingatkan AICHR untuk mengimplementasikan langkah-langkah berikut untuk menjamin proses perancangan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN berjalan

secara kredibel, inklusif, transparan, reflektif dan konsisten dengan standar hak Asasi manusia universal:

1. Untuk segera mempublikasikan draf AHRD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara berarti di dalam proses penyusunan. Konsultasi akan tetap tidak berarti apabila draf deklarasi terus berstatus rahasia dan tidak terjangkau oleh masyarakat.
2. Perwakilan AICHR yang telah melaksanakan konsultasi nasional dengan masing-masing negara untuk terus melakukan hal ini, dan memastikan bahwa konsultasi dilaksanakan dalam skala nasional, secara inklusif dan berkala. Mereka harus terus mendorong representatif AICHR lainnya yang belum mengambil inisiatif, untuk segera melaksanakan. AICHR juga dianjurkan untuk melaksanakan konsultasi baik di level nasional maupun regional, terutama apabila konsultasi nasional belum berlaku di beberapa tempat.
3. Untuk menerjemahkan draf AHRD ke dalam bahasa nasional yang bahasa lokal yang ada di negara-negara ASEAN untuk mendorong partisipasi publik dalam kawasan.
4. Untuk memastikan bahwa pertemuan konsultasi yang dilaksanakan AICHR akan bersifat inklusif terhadap semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat sipil dan institusi nasional yang bergerak di bidang hak Asasi manusia.

Hingga dan hanya apabila AICHR berkonsultasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan secara transparan, berarti dan substantif, AICHR sebaiknya mengundur proses pengumpulan draf akhir AHRD ke Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (AMM), yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan July 2012.

Media contact person:

Mr. Haris Azhar, Coordinator of Kontras, Indonesia
+ 62 (0) 815-13302342, haris_azhar@yahoo.com

List of endorsers:

1. Aceh Human Rights Coalition of NGO, Indonesia
2. Action for Environment and Community (AEC), Cambodia
3. All Arakan Students and Youth Congress (AASYC), Burma
4. All Burma Students Democratic Front (ABSDF), Burma
5. All Burma Students League (ABSL), Burma
6. All Kachin Students and Youth Union (AKSYU), Burma
7. All Women's Action Society (AWAM), Malaysia
8. Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean Burma)
9. Arakan League for Democracy (Exile) Youth (ALD-Youth), Burma
10. ASEAN WATCH, Thailand
11. Asian Forum for Human Rights and Development
12. Asian Indigenous People's Pact
13. Assistance Association for Political Prisoners - Burma
14. Back Pack Health Worker Team
15. Banteay Srei, Cambodia
16. Boat People SOS
17. Building Community Voice (BCV), Cambodia
18. Burma Issues, Burma
19. Burma Medical Association, Burma
20. Burma Partnership, Burma
21. Burmese Women Union, Burma
22. Cambodia Indigenous Youth Association (CIYA), Cambodia
23. Cambodian Centre for Human Rights (CCHR), Cambodia
24. Cambodian Confederation of Unions (CCU), Cambodia
25. Cambodian Food Service Workers Federation (CFSWF), Cambodia
26. Cambodian Independent Teachers' Association (CITA), Cambodia
27. Cambodian League for the promotion and defense of Human Rights (LICADHO), Cambodia
28. Cambodian Watchdog Council (CWC), Cambodia
29. Cambodian Youth Network (CYN), Cambodia
30. Center for Migrant Advocacy Philippines
31. Child Rights Coalition-Asia
32. Chin Human Rights Organization (CHRO), Burma
33. Chin Students Union (CSU), Burma
34. Christians for Social Justice (CJS), Cambodia
35. Coalition of Cambodian Farmer Community (CCFC), Cambodia
36. Commission for Disappeared and Victims of Violence (Kontras), Indonesia
37. Community Action Network, Malaysia
38. Community Resource Centre (CRC), Thailand
39. Democratic Party for a New Society (DPNS), Burma
40. Dignity International, Malaysia
41. EarthRights International, Burma
42. Ecological Alert and Recovery Thailand (EARTH), Thailand

43. Education and Research Association for Consumers (ERA Consumer), Malaysia
44. EMPOWER Foundation, Thailand
45. Empowering Youth in Cambodia (EYC), Cambodia
46. Ethnic Community Development Forum (ECDF-Burma)
47. FOKER LSM, Papua
48. Foundation for Consumers (FFC), Thailand
49. Foundation for Ecological Recovery, Thailand
50. Foundation for Sustainable Development, Thailand
51. Foundation for Women, Law and Rural Development (FORWARD), Thailand
52. Foundation for Women, Thailand
53. EMPOWER Foundation, Thailand
54. Highland Peoples Task force (HPT), Thailand
55. Homenet, Thailand
56. Housing Rights Task Force, Cambodia
57. Human Rights Documentation Unit, Burma
58. Human Rights Education Institute of Burma
59. Human Rights Foundation of Monland, Burma
60. Human Rights Lawyers Association, Thailand
61. Humanum, Indonesia
62. Independent Democracy of Informal Economic Association (IDEA), Cambodia
63. Indigenous People Task Force on ASEAN
64. Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), Indonesia
65. International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)
66. JATAM, Indonesia
67. Kachin Women's Association – Thailand (KWAT), Burma
68. Karen Youth Organization (KYO), Burma
69. Kayan New Generation Youth (KNGY), Burma
70. Khmer Ahimsa Organisation, Cambodia
71. KIARA, Indonesia
72. KontraS (National Office, Jakarta, Indonesia)
73. Kuki Students Democratic Front (KSDF), Burma
74. Lahu Women's Organization, Burma
75. Lao Movement for Human Rights (MLDH)
76. LPSHAM, Indonesia
77. M Plus Foundation, Thailand
78. Messenger Band (MB), Cambodia
79. Migrant Forum in Asia
80. Migrante International, Philippines
81. Mon Youth Progressive Organization (MYPO), Burma
82. My Village Organization (MVi), Cambodia
83. Naga Youth Organization (NYO), Burma
84. National League for Democracy-Liberated Area (Youth), Burma
85. Network for Democracy and Development (NDD), Burma
86. Network for Human Rights Documentation in Burma

87. Network of Eastern Democracy, Thailand
88. NGO Coordinating Committee on Development (NGO-COD), Thailand
89. Northern Development Foundation, Thailand
90. One-2-One, Cambodia
91. Pa O Youth Organization (PYO), Burma
92. Palang Thai, Thailand
93. Palaung Women's Organization, Burma
94. People's Action for Change (PAC), Cambodia
95. People's Defense Force (Burma)
96. People's Empowerment Foundation
97. Persatuan Masyarakat Selangor & Wilayah Persekutuan (PERMAS), Malaysia
98. Pokja 30, Indonesia
99. Project for Ecological Awareness Building (EAB), Thailand
100. Pro Rights Foundation, Thailand
101. Pusat Komunikasi Masyarakat (PUSAT KOMAS), Malaysia
102. Quê Me: Action for Democracy in Vietnam
103. Rainbow Community Kampuchea (RoCK), Cambodia
104. Sahakum Teang Tnaut (STT), Cambodia
105. Sex Workers Organization, Thailand
106. Shwe Gas movement
107. SILAKA, Cambodia
108. Social Action for Change (SAC), Cambodia
109. Social Agenda Working Group, Social Research Institute, Chulalongkorn University, Thailand
110. Society of Transsexual Women of the Philippines (STRAP), Philippines
111. South East Asia Working Group/ Asia-Pacific Refugee Rights Network
112. South East Asian Committee for Advocacy (SEACA)
113. Southeast Asia Coalition to stop Child Soldiers
114. Southeast Asia Popular Communications Programme (SEAPCP)
115. Students and Youth Congress of Burma
116. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Malaysia
117. Sustainable Agriculture Foundation, Thailand
118. Sustainable Development Foundation, Thailand
119. Ta'ang Students and Youth Organization (TSYO), Burma
120. Tavoy Youth Organization (TYO), Burma
121. Thai Committee for Refugees Foundation, Thailand
122. Thai Working Group for Climate Justice (TCJ), Thailand
123. The Cambodian Center for Human Rights, Cambodia
124. The Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC), Cambodian
125. The Northeastern Women's Network, Thailand
126. Think Centre, Singapore
127. Union for Civil Liberty (UCL), Thailand
128. United Lahu Youth Organization, Burma
129. Vietnam Committee on Human Rights
130. Volunteers for Sustainable Development (VSD), Cambodia

131. Women and Children Protection Foundation, Thailand
132. Women's Global Network for Reproductive Rights (WGNRR)
133. YLBHI, Indonesia
134. Yoma3 News Service, Burma
135. Youth for Social Change, Myanmar
136. Zomi Students and Youth Organization (ZSYO), Burma